

BAB III

PEMIKIRAN NURCHOLIS MADJID TENTANG NILAI-NILAI

KEISLAMAN DALAM PENDIDIKAN PANCASILA

A. Biografi Nurcholis Madjid

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan

Nurcholish Madjid atau disapa “Cak Nur” lahir pada 17 Maret 1939 dari keluarga pesantren di Jombang, Jawa Timur. Berasal dari keluarga NU (Nahdlatul Ulama) tetapi berafiliasi politik modernis, yaitu Masyumi. Ia mendapatkan pendidikan dasar (SR) di Mojoanyar dan Bareng, juga Madrasah Ibtidaiyah di Mojoanyar, Jombang. Kemudian melanjutkan pendidikan di pesantren (tingkat menengah SMP) di Pesantren Darul `Ulum, Rejoso, Jombang. Tetapi karena ia berasal dari keluarga NU yang Masyumi, maka ia tidak *betah* di pesantren yang afiliasi politiknya adalah NU ini, sehingga ia pun pindah ke pesantren yang modernis, yaitu KMI (Kulliyatul Mu`allimin Al-Islamiyyah), Pesantren Darus Salam di Gontor, Ponorogo. Di tempat inilah ia ditempa berbagai keahlian dasar-dasar agama Islam, khususnya bahasa Arab dan Inggris.¹³¹

Dari Pesantren Gontor yang sangat modern pada waktu itu, Cak Nur kemudian memasuki Fakultas Adab, Jurusan Sastra Arab, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, sampai tamat Sarjana Lengkap (Drs.), pada 1968.¹³²

¹³¹ Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban jilid 1 edisi digital* (t.tp: MIZAN, 2006), iiv.

¹³² Ibid., Ivi.

Nurcholis Madjid juga berkesempatan melanjutkan studinya di Universitas Chicago, Amerika Serikat melalui beasiswa yang ia peroleh dari *Ford Foundation*. Dari sanalah ia meraih doktor filsafatnya dengan predikat *summa cum laude* pada tahun 1984. Bahkan atas prestasi dan sumbangan pemikirannya bagi peradaban Islam, di kemudian hari Cak Nur cukup intens diminta menjadi dosen ...di berbagai universitas terkemuka yang membuka kajian keislaman seperti Universitas Montreal dan Universitas Mc. Gill, di Kanada.¹³³

Dan selama di Universitas Chicago, tepatnya dari tahun 1978-1984. Cak Nur secara leluasa bisa berjumpa dengan kepustakaan Islam Klasik dan Islam abad pertengahan yang begitu luas dan karya langsung di bawah mentor ilmuwan neo-modernis asal Pakistan Prof. Fazlur Rahman. Pada saat itulah benih pemikiran neo-modernis mulai diserap Cak Nur dan pengertian baru mengenai pemikiran dan praktik gerakan neo-modernis ini pun tampaknya terakumulasi selama ia menempuh pendidikan S-3 nya itu.¹³⁴

Saat pulang dari Chicago, AS, pada tahun 1984, dengan menggondor gelar doktornya, tampaknya Cak Nur membawa harapan tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi komunitas muslim yang sempat diguncang dengan ide-ide pembaharuannya. Di Chicago, Cak Nur telah berhasil mempertahankan disertasinya dengan menyandang predikat *Cum Laude* tentang: *Ibn Taymiya on Kalam dan Falsafah: Problem of Reason*

¹³³ Malik Dan Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia...*, 128.

¹³⁴ Ibid.

and Revelation in Islam. Pada saat itulah yang hampir bersamaan, terbit pula buku pertama Cak Nur yang merupakan karya terjemahan dan diberi kata pengantarnya sendiri, yaitu *Khazanah Intelektual Islam*, diterbitkan Bulan Bintang, Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia.¹³⁵

Gagasan Cak Nur terus berkembang, khususnya setelah ia dan kawan-kawannya yang lain mendirikan Yayasan Wakaf Paramadina, pada Oktober 1986. Dan ide-ide yang terekam dalam entri-entri ensiklopedia ini menggambarkan keluasan wacana di Paramadina ini. Dan sejak awal Paramadina memang didesain elite secara intelektual.¹³⁶

Maka sejak Paramadina didirikan hampir setiap bulan ia menulis paper untuk keperluan diskusi di Klub Kajian Agama (KKA), yang sekarang telah mencapai pertemuan ke-200 dalam 17 tahun. Sebagian makalah-makalah Cak Nur kemudian menjadi buku seperti *Islam: Doktrin dan Peradaban* (1992), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (1994), dan sebagainya.¹³⁷

B. Karya-karya Nurcholis Madjid

Di antara kontribusi pemikiran modernnya yang dituangkan dalam karya-karya tulis antara lain:

1. *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982);
2. *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987,1988);

¹³⁵ Ibid., 131-132.

¹³⁶ Budhy Munawar Rachman, *Membaca Nurcholis Madjid Islam dan Pluralisme Edisi Digital* (Jakarta: Democracy Project, 2011), 36.

¹³⁷ Ibid., 38.

3. Islam Doktrin dan Peradaban, sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan (Jakarta: Paramadina, 1992);
4. Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 1993);
5. Pintu-pintu Menuju Tuhan (Jakarta: Paramadina, 1994);
6. Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1995);
7. Islam Agama Peradaban, Membangun Makna Dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah (Jakarta: Paramadina, 1995);
8. "The Issue of Modernization among Muslim in Indonesia, A Participant Point of View" dalam Gloria Davies, ed. *What is Modern Indonesia Culture* (Athens, Ohio, Ohio University, 1978);
9. *What Is Modern Indonesian Culture?* (Athens, Ohio, Universitu Of Ohio, Southeast Asia Studies, 1979);
10. *Islam In Indonesia: Chalenges And Oppurtinities* (Dalam Cyriac K. Pullapilly (Ed.)); *Islam In The Contemporary World* (Notre Dame, Indian, Cross Roads Book, 1980).¹³⁸

C. Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Nilai Keislaman dalam Sila Pancasila

Pencasila dengan semua silanya itu adalah suatu kesatuan yang utuh, yang tidak boleh dan tidak dapat dipisahkan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, pelaksanaan Pancasila pun haruslah utuh, tanpa ada tekanan pada salah satu

¹³⁸ M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher, *Agama dan Dialog Antar Peradaban* (Jakarta: PT Temprint, 1996), 193.

silanya secara tidak beralasan. Sementara itu, untuk kepraktisan pendekatan, kita dapat mencoba memahami lebih jauh masing-masing sila itu, kemudian melihat kemungkinan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelaksanaan nilai-nilai yang berlandaskan kepadanya. Menurut Cak Nur, perlu disadari bahwa antara sila-sila dalam Pancasila tersebut ada kaitan yang sangat erat yang menjadi perekat bagi keutuhan nilai ideologisnya. Dari adanya keterkaitan ini kita bisa mencoba memahami makna yang terkandung dalam sila-sila ini secara lebih utuh.¹³⁹

1. Ketuhanan Yang Maha Esa (Pluralisme)

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan konsistensi mutlak pendasaran segala permasalahan kepada Pancasila. Sudah ditegaskan bahwa kami, bersama dengan banyak orang di Indonesia ini berpendapat bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila primer dan sumber Pancasila.¹⁴⁰

Dalam hal ini Cak Nur menukil pendapat Buya Prof. Dr. Hamka, yang memberi perumpamaan tentang Pancasila sebagai suatu bilangan 10.000 (sepuluh ribu), di mana angka 1 (satu) merupakan perumpamaan sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa), dan empat angka nol berikutnya merupakan perumpamaan empat sila selanjutnya. Sekarang hilangkan angka 1 (satu) itu, maka yang akan terjadi ialah deretan empat angka nol semata. Dan betapun panjangnya deretan angka nol itu, nilainya akan tetap

¹³⁹ Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia Cetakan 1* (Jakarta Selatan: Paramadina, 1997), 239.

¹⁴⁰ Nurcholis Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan edisi 2* (Bandung: Mizan, 2013), 241.

juga. Demikianlah Buya Hamka. Pendeknya, Ketuhanan Yang Maha Esa itulah secara mutlak memberi arti bagi Pancasila dan sila apa pun dalam kehidupan manusia. Sebab, seperti dikatakan oleh Gardner dalam Cak Nur, Ketuhanan Yang Maha Esa itulah yang mendasari dimensi-dimensi moral yang akan menopang setiap peradaban manusia. Dan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau tauhid, itulah yang menjadi sentral dan intisari agama-agama yang dibawa oleh para nabi, semenjak nabi pertama sampai nabi terakhir (Muhammad SAW.).¹⁴¹ Demikianlah dikatakan dalam firman Allah yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

Artinya:

Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku".¹⁴²

Jika tidak demikian, maka kita akan menjadi sekuler. Sekularisme ialah suatu paham yang dimulai dengan perumpamaan: "Berikan kepada kaisar apa yang menjadi kepunyaan kaisar (urusan duniawi) dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi kepunyaan Tuhan (urusan ukhrawi)". Dengan perkataan lain, sekularisme adalah suatu paham yang mengatakan bahwa Tuhan tidak berhak mengurus masalah-masalah duniawi. Masalah-masalah duniawi harus diurus dengan cara-cara lain, yang tidak datang dari Tuhan. Jadi, sekularisme adalah paham tidak ber Tuhan dalam

¹⁴¹ Nurcholis Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan edisi 1* (Bandung: Mizan, 2008), 189.

¹⁴² QS. Al-Anbiya' (21): 25.

kehidupan duniawi manusia. Maka, seorang sekuler yang konsekuen dan sempurna adalah seorang ateis. Dan seorang sekuler yang kurang konsekuen akan mengalami kepribadian yang pecah (*split personality*). Di satu pihak mungkin dia tetap mempercayai adanya Tuhan, malahan menganut suatu agama, di lain pihak dia tidak mengakui kedaulatan Tuhan dalam masalah-masalah duniawinya, melainkan hanya mengakui adanya kedaulatan penjajah manusia. Tegasnya, dalam masalah duniawi, seorang sekuler pada hakikatnya tidak lagi ber-Tuhan, jadi dia adalah ateis. Maka jika agama, khususnya Islam, menaruh keberatan prinsipal terhadap komunisme, terutama karena ateisnya itu. Sebab, ateisme menjurus ke imperialisme. Karena sebagaimana dalam teori dan praktik, orang yang memulai sesuatu dengan mengingkari adanya keutamaan Zat Yang Maha Tinggi (Tuhan), maka akhirnya ia akan mengingkari nilai-nilai.¹⁴³

Selain masalah sekularisme, negara Indonesia sendiri, menurut Cak Nur juga bukan negara teokratis. Ungkapan itu, meskipun mengandung arti yang membingungkan bagi kebanyakan orang, selalu diulang-ulang oleh para pejabat kita, dan sangat ditekankan oleh presiden Soeharto sendiri. Mengandung bahwa negara ini bukan negara teokratis atau negara agamis, bagi mereka yang tidak memahami problem ideologis bangsa ini, akan terdengar absurd. Namun pada kenyataannya, itulah “cara yang tepat” bagi mayoritas masyarakat Indonesia, secara ideologis, dalam memandang negerinya sendiri. Bagi mereka yang memahami masalah ini,

¹⁴³ Madjid, *Islam* ., 190.

ungkapan tersebut di atas, menyiratkan adanya kompromi dan kesepakatan yang rumit di antara para pendiri Republik ini, yaitu kompromi yang rumit antara nasionalis muslim dan nasionalis sekuler menyangkut ideologi nasional yang resmi. Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa beberapa bulan sebelum dan sesudah Kemerdekaan Nasional, 17 Agustus 1945, yang tatkala pasukan Jepang, yang disponsori Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memperdebatkan mengenai landasan filosofis yang akan dijadikan pijakan Republik ini.¹⁴⁴

Nasionalis Muslim atau, setidaknya yang secara Islami mengilhami orang-orang nasionalis, menginginkan Indonesia yang merdeka berlandaskan Islam, dan itu berarti mengimplikasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (*Islamic State of Indonesia*). Akan tetapi nasionalis sekuler, yang kebanyakan dari mereka adalah penganut Islam sendiri dan non-muslim, menolak gagasan di atas, sehubungan dengan kenyataan bahwa, ada juga non-muslim yang turut berjuang melawan kolonialis. Nasionalis sekuler juga mengingatkan bahwa menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara Islam sama saja dengan merendahkan, secara tidak adil, penganut agama lain ke dalam warga negara kelas dua.¹⁴⁵

Soekarno, nasionalis sekuler paling terkemuka, yang menjadikan presiden pertama Republik ini, menawarkan suatu kompromi dengan merujuk, secara bersama-sama, pada unsur-unsur kecenderungan ideologis manusia, dan beliaulah yang memperkenalkan ide Pancasila, yaitu

¹⁴⁴ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 2010), 3-4.

¹⁴⁵ *Ibid.*, 4.

Ketuhanan, Kemanusiaan, Nasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan Sosial. Pada 5 Juni 1945, hari ketika Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal di depan PPKI guna menjelaskan secara terperinci ke-Lima Sila di atas, kemudian oleh sebagian bangsa Indonesia dianggap sebagai hari “hari lahirnya Pancasila”. Namun, sebenarnya pada 22 Juli 1945-lah Pancasila menemukan bentuknya yang paling sempurna, yakni tatkala PPKI merumuskan konsep Deklarasi Kemerdekaan Indonesia, yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Sebagaimana dinyatakan dalam sila pertama, hal terpenting menyangkut Piagam Jakarta adalah menyatakan ketentuan bahwa Hukum Islam atau Syari’ah akan dijalankan oleh negara. Dengan demikian pada hakikatnya Islam adalah agama negara Indonesia. Dokumen ini ditandatangani oleh 9 pemimpin Indonesia yang paling terkemuka, delapan diantaranya beragama Islam dan seorang beragama Kristen, yaitu A.A. Maramis.¹⁴⁶

Piagam Jakarta ini sebenarnya dimaksudkan sebagai teks deklarasi kemerdekaan bangsa tepat pada waktunya masih harus di rumuskan, dan dimasukkan kedalam mukaddimah dari Konstitusi Indonesia yang diusulkan. Namun, tatkala Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini, 17 Agustus 1945, mereka tidak menggunakan piagam ini. Sebaliknya, mereka merumuskan sebuah dokumen baru, kemudian dikenal sebagai teks proklamasi, sebuah dokumen yang sangat ringkas yang di dalamnya tidak disebutkan secara rinci apa yang akan

¹⁴⁶ Ibid., 4-5.

dijadikan *nature* dari negara Indonesia merdeka ini, dan di dalamnya tidak pula disebutkan sesuatu menyangkut agama Islam atau agama lainnya.¹⁴⁷

Keesokan harinya, 18 Agustus 1945, suatu alasan yang jelas-jelas menentang berdirinya negara Islam muncul dengan sendirinya. Tatkala berlangsung rapat PPKI untuk merumuskan konstitusi, sehari setelah kemerdekaan Indonesia itu diumumkan, ada informasi yang menyatakan bahwa orang-orang Kristen yang berasal dari Sulawesi Utara, Tanah kelahiran A.A. Maramis, secara serius menolak satu ungkapan dalam piagam tersebut yang menyatakan: “Ketuhanan dengan ketetapan tertentu kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluknya.” Muhammad Hatta, yang memimpin rapat itu, setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan dan Kasman Singodimedjo, dua pemimpin Muslim terkemuka, menghapus ungkapan tujuh kata dari Piagam Jakarta yang menjadi keberatan dimaksud. Sebagai gantinya, atas usul Ki Bagus Hadikusumo (yang kemudian menjadi ketua gerakan pembaharu Islam Muhammadiyah), ditambahkan sebuah ungkapan baru dalam sila Ketuhanan itu, sehingga berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁴⁸

Dalam hal ini, Hatta tidak melihat perlunya didirikan sebuah negara agama atau negara yang resmi berlandaskan agama. Bagi beliau masalah yang terpenting adalah substansinya, yang harus diperjuangkan untuk dilaksanakan oleh sebuah negara. Dan orang-orang Muslim, tanpa perlu menanamkan negara mereka “Negara Islam (Indonesia)”, mungkin akan

¹⁴⁷ Ibid., 5.

¹⁴⁸ Ibid.

mendapati basis etis substansi ini dalam ajaran Islam. Hatta, sebagaimana diakui oleh kalangan luas, adalah seorang patriot di samping orang kedua setelah Soekarno, yang mengorbankan jiwa raganya demi negara, namun dalam hal bidang pemikiran politik dan sosial beliaulah yang paling konsisten. Beliau hidup dalam lingkungan keluarga dan latar belakang keagamaan yang sufisme Islam yang kuat. Dengan mengikuti apa yang telah dicontohkan Muhammad Hatta ini, Indonesia akan mendapati solusi terhadap masalah religio-politis yang kini sedang dihadapinya.¹⁴⁹

2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab (Semangat Humanistik dan Universalitas Islam)

Dalam rangka memahami sila Perikemanusiaan itu yang penting sekali disadari adalah kemestian adanya pra anggapan dasar bahwa manusia merupakan makhluk kebaikan, yang senantiasa merindukan dan berusaha menemukan kebenaran dan kebaikan. Sebab, sejalan dengan hati nuraninya yang merupakan locus dari hakikat kesucian asalnya yang hakiki itu. Kebenaran dan kebaikan adalah bagian hakiki dari keinsafan akan makna dan tujuan hidup yang akan memberinya kebahagiaan. Dan sebaliknya, dia akan sengsara dengan kejahatan dan kepalsuan. Karena hakikat kemanusiaan yang sangat mendasar itu maka dengan sendirinya setiap orang harus menghormati dan memuliakan sesamanya dengan perlakukannya dengan baik dan benar, atau dengan adil dan beradab.

¹⁴⁹ Ibid, 20-21.

Di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa berbuat baik kepada satu orang memiliki nilai yang sama dengan berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Penegasan ini merupakan kesimpulan dari penuturan tentang pembunuhan Qabil terhadap Habil; keduanya adalah anak Nabi Adam as. Penyebab pembunuhan itu adalah dengki atau iri hati, karena persembahan korban dari Qabil diterima Tuhan sementara persembahan korban Habil ditolak. Padahal alasan penerimaan itu adalah karena Habil melakukan korban secara ikhlas, sedangkan Qabil tidak. Maka, Qabil pun membunuh Habil.¹⁵⁰ Al-Quran menegaskan:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا¹⁵¹

Artinya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

Ayat ini penting sekali sebagai refleksi atau renungan karena ia tidak pernah menjadi doktrin Islam. Artinya, ia tidak pernah dielaborasi di dalam teologi, syariat, dan sebagainya. Padahal Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa setiap pribadi mempunyai nilai ke-manusiaan universal, sehingga kejahatan pada seseorang, tidak pernah merupakan kejahatan pribadi tetapi kejahatan kemanusiaan universal. Sebaliknya,

¹⁵⁰ Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedia Nurcholis Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban Jilid 3 Edisi Digital* (Jakarta: Mizan, 2006), 2197.

¹⁵¹ QS. Al-Maidah (5): 32.

kebaikan kepada seseorang juga tidak pernah merupakan sekedar kebaikan kepada seorang pribadi atau individu tetapi kebaikan kepada kemanusiaan universal.¹⁵²

Oleh karena itu, kebenaran antara sesama manusia harus ditegakkan. Sehingga tidak menjadi “mandul” dan kehilangan segi kemaslahatan umum yang diakui secara meluas dalam masyarakat.¹⁵³

3. Persatuan Indonesia (Bhineka Tunggal Ika)

Persatuan adalah nilai *piranti* yang sangat esensial dan strategis. Persatuan memberi wadah bagi setiap usaha melaksanakan nilai-nilai luhur kehidupan diwujudkan. Tanpa persatuan, nilai-nilai luhur itu tidak akan mudah diwujudkan. Karena persatuan merupakan nilai esensial bagi pelaksanaan nilai-nilai luhur dan menjadi *conditio sine qua non* bagi pelaksanaannya, maka kedudukannya menjadi sama pentingnya dengan nilai-nilai luhur itu sendiri.

Sementara itu, nilai Persatuan Indonesia itu harus kita persepsikan dalam rangkaian kesatuan dengan motto nasional, Bhinneka Tunggal Ika. Motto itu mengandung pengakuan dasar bahwa negara Indonesia merupakan masyarakat bhinneka atau majemuk (plural). Dan atas dasar kebhinnekaan itu ditegakkan persatuan yang dinamis. Persatuan yang dinamis (tidak statis) adalah persatuan dalam kemajemukan, dengan makna tersirat yang mengakui adanya hak untuk berbeda dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Persatuan

¹⁵² Rachman, *Ensiklopedi Nurcholis* ., 2197-2198.

¹⁵³ Madjid, *Tradisi Islam* ., 242-243.

Indonesia adalah persatuan yang memberi ruang pada kreativitas atau daya cipta berdasarkan kebebasan yang bertanggungjawab yaitu kebebasan dalam bingkai persatuan dan menghasilkan persatuan atas dasar dinamika kebebasan yang absah.¹⁵⁴

Disebut “kebebasan yang bertanggung jawab” atau “absah” karena dinamika masyarakat tidak boleh menjerumuskan bangsa pada situasi kacau (*chaos*), yang justru akan meniadakan ruang bagi pelaksanaan kebebasan itu sendiri. Kebebasan tidak mungkin terwujud dalam masyarakat yang kacau. Karena kekacauan itu sendiri secara logis politis akan memberi peluang tampilnya “orang kuat” atau diktator yang akan merampas kebebasan dengan dalih bahwa mereka akan mengatasi kekacauan tersebut.¹⁵⁵

Disebabkan sifat alamiah manusia yang berbeda-beda sesuai dengan sunnatullah, maka sangat logis bahwa ajaran Allah tentang persaudaraan berdasarkan iman diberikan dalam kerangka kemajemukan (pluralitas), bukan ketunggalan (monolitik). Sebab hukum perbedaan yang ditetapkan Allah untuk umat manusia itu juga berlaku pada kalangan kaum beriman sendiri. Bagaimanapun, kaum beriman terdiri dari pribadi-pribadi dengan latar belakang biografi, sosial dan budaya yang berbedabeda.¹⁵⁶ Dan persaudaraan berdasarkan iman atau ukhuwah Islamiah dalam kerangka kemajemukan itu dengan jelas diajarkan Allah dalam suatu deretan firman yang berbunyi:

¹⁵⁴ Ibid., 243.

¹⁵⁵ Rachman, *Ensiklopedia Nurcholis* ., 2628.

¹⁵⁶ Ibid., 2628-2629.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*¹⁵⁷

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.*¹⁵⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ
مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ
بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim.*¹⁵⁹

¹⁵⁷ QS. Al-Hujurat (49): 9.

¹⁵⁸ QS. Al-Hujurat (49): 10.

¹⁵⁹ QS. Al-Hujurat (49): 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.*¹⁶⁰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹⁶¹

Itulah deretan firman suci yang harus kita pahami berkenaan dengan ajaran tentang persaudaraan berdasarkan iman atau ukhuwah Islamiah. Selain menegaskan prinsip bahwa semua kaum beriman itu bersaudara (antara lain karena, seperti telah dicoba paparkan di atas, adanya kemestian rahmat Allah kepada kaum beriman, jika memang beriman secara sejati),

¹⁶⁰ QS. Al-Hujurat (49): 12.

¹⁶¹ QS. Al-Hujurat (49): 13.

deretan firman suci itu juga memberi petunjuk konkret dan praktis tentang bagaimana memelihara persaudaraan di kalangan kaum beriman.¹⁶²

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan (Demokrasi)

Sila ini sering dipahami sebagai sila demokrasi. Sila kerakyatan ini juga tidak mungkin dipisahkan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Peri Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan sila Persatuan Indonesia yang dinamis (persatuan yang diwujudkan dalam kerangka makna dan semangat Bhinneka Tunggal Ika). Jika kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana telah dijabarkan di atas, benar-benar menghasilkan budi pekerti luhur yang diterjemahkan ke dalam nilai Perikemanusiaan yang adil dan beradab dengan pola hubungan sosial yang saling menghormati dan menghargai, maka salah satu muara nilai dan sikap itu adalah kesediaan untuk mengakui kekuasaan rakyat dalam kehidupan bernegara dan berperikemanusiaan. Pengakuan pada kekuasaan rakyat itu dimulai dengan pengakuan adanya hak setiap warga negara untuk pendapat. Setelah adanya pengakuan hak warga negara ini sebagai imbalannya yang logis, dilanjutkan dengan pengakuan pada adanya kewajiban setiap orang untuk mendengar dan memperhatikan pendapat orang lain. Hak setiap orang untuk menyatakan pendapat adalah karena adanya nilai kemanusiaan universal yang beranggapan dasar bahwa manusia adalah makhluk kebenaran dan kebaikan. Sedangkan kewajiban

¹⁶² Rachman., *Ensiklopedia Nurcholis* ., 2630.

setiap orang untuk mendengar dan memperhatikan pendapat orang lain ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia itu adakalanya berpandangan dan berbuat salah karena alpa atau keliru. Dinamika tarik-menarik antara hak dan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan ini melahirkan mekanisme musyawarah.¹⁶³

Musyawarah merupakan gambaran tentang bagaimana kaum beriman menyelesaikan urusan sosial mereka. Karena itu baik sekali bahwa negara kita yang berasaskan Pancasila ini menetapkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai cara mencari pemecahan bersama masalah-masalah kemasyarakatan.¹⁶⁴ Hal ini disebabkan, menurut agama, *ra'sul hikmah al-masyurah* (pangkal kebijaksanaan ialah musyawarah). Bahkan Rasulullah pun, dalam urusan kemasyarakatan, diperintah Allah untuk menjalankan musyawarah, dan untuk bersikap teguh melaksanakan hasil musyawarah itu dengan bertawakal kepada Allah, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian

¹⁶³ Ibid., 244.

¹⁶⁴ Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Paramadina, 2000), 8.

*apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.*¹⁶⁵

Maka sejalan dengan itu, masyarakat kaum beriman sendiri dilukiskan dalam kitab suci sebagai masyarakat yang dalam segala perkaranya, membuat keputusan melalui musyawarah. Masyarakat pimpinan Nabi, demikian pula masyarakat pimpinan empat khalifah yang bijaksana, adalah masyarakat yang ditegakkan atas dasar prinsip musyawarah.¹⁶⁶

Menurut Cak Nur, pada dasarnya prinsip musyawarah tidak akan berjalan produktif tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, yang dalam tatanan modern kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilembagakan antara lain dalam kebebasan akademik dan kebebasan pers. Tapi prinsip musyawarah itu juga akan rusak oleh sikap-sikap absolutistik dan keinginan mendominasi wacana karena tidak adanya perasaan cukup rendah hati untuk melihat kemungkinan orang lain berada di pihak yang lebih baik atau lebih benar. Musyawarah yang benar adalah musyawarah yang terjadi atas dasar kebebasan dan tanggung jawab kemanusiaan: dasar tatanan masyarakat dan negara demokratis.¹⁶⁷

Maka, demokrasi, sebagaimana dikehendaki oleh logika musyawarah itu sendiri, senantiasa menuntut dari masing-masing pihak yang bersangkutan kesediaan secara tulus bertemu dalam titik kesamaan

¹⁶⁵ QS. Al-Imran (3): 159.

¹⁶⁶ Nurcholis Madjid, *Islam, Kemordenan Dan Keindonesiaan Cet.xi* (Bandung: Mizan, 1998), 59.

¹⁶⁷ Rachman, *Ensiklopedia Nurcholis .*, 2135.

kebaikan bagi semua, dalam semangat memberi dan mengambil yang dijiwai oleh pandangan ke manusiaan yang optimis dan positif. Oleh karena itu pula, demokrasi dengan musyawarah yang benar sebagai landasannya itu tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia atau egalitarianisme yang kuat dan akan kandas oleh adanya stratifikasi sosial yang kaku dan *a priori* dalam sistem sistem paternalistik dan feodalistik.¹⁶⁸

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Keadilan)

Sila ini dipandang sebagai tujuan kehidupan kita bernegara dan bermasyarakat yang beriman dan bertaqwa (sila pertama), mengikuti prinsip-prinsip kemanusiaan (sila kedua), bersatu nasional (sila ketiga), dan mengakui kedaulatan atau kekuasaan rakyat dengan menerapkan mekanisme musyawarah/mufakat (sila keempat). Keadilan di sini bukan berarti bahwa tiap orang harus memperoleh dan memiliki kekayaan yang sama, seperti semboyan yang pernah dipopulerkan oleh orang-orang PKI “sama rata sama rasa”. Namun, keadilan yang dimaksud adalah adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan rakyat Indonesia. Keadilan ini akan terwujud jika keempat sila yang lainnya bisa dilaksanakan secara utuh dan berkesinambungan.¹⁶⁹

Di dalam Al-Quran sendiri banyak menyebutkan masalah keadilan dalam berbagai konteks. Selain perkataan “adil” (Arab: *‘adl*), untuk makna “keadilan” dengan berbagai nuansanya, Kitab Suci juga menggunakan

¹⁶⁸ Ibid., 2135-2136.

¹⁶⁹ Ibid., 245-246.

perkataan “*qisth*” dan “*wasth*”. Para ahli tafsir ada yang memasukkan sebagian dari pengertian kata-kata “*mîzân*” ke dalam pengertian “*‘adl*”. Semua pengertian berbagai kata-kata itu bertemu dalam suatu ide umum sekitar “sikap tengah yang berkeseimbangan dan jujur”.¹⁷⁰

Beberapa firman Ilahi tentang keadilan adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹⁷¹

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا¹⁷²

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ¹⁷³

¹⁷⁰ Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedia Nurcholis Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban Jilid 2 Edisi Digital* (Jakarta: Mizan, 2006), 1289.

¹⁷¹ QS. An-Nahl (16): 90.

¹⁷² QS. An-Nisa' (4): 58.

¹⁷³ QS. Al-Maidah (5): 8.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن
تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا¹⁷⁴

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Dari beberapa kutipan firman Tuhan itu dapat dirasakan betapa kuatnya aspirasi keadilan dalam Islam. Semangat ini merupakan kelanjutan aspirasi dan pemikiran bangsa-bangsa Semit, karena pengalaman mereka dalam menjalankan pemerintahan yang senantiasa mengandung godaan ke arah kezaliman. Dalam lingkupnya yang lebih luas, ketika budaya bernegara itu menular kepada bangsa-bangsa Arya, khususnya Persia atau Iran, maka aspirasi keadilan itu secara amat pekat mewarnai dunia pemikiran kenegaraan budaya Irano-Semitik. Maka dari sudut pandang ini, cita-cita keadilan yang amat kuat dalam Islam merupakan puncak dari proses

¹⁷⁴ QS. An-Nisa' (4): 135.

pertumbuhan budaya Irano-Semitik itu yang secara historis-sosiologis menyatakan diri dalam misi suci para nabi dan rasul.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Rachman, *Ensiklopedia Nurcholis* ., 1290.